

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu upaya dalam rangka mewujudkan transparansi, akuntabilitas dan tata kelola yang baik (good governance). Penyampaian laporan keuangan terhadap pertanggungjawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah di terima secara umum. Hal ini diatur dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang direvisi dengan Undang-undang No 23 Tahun 2014, yang kemudian diperbaharui dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No 02 Tahun 2014, Dimana upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah, baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Pengelolaan keuangan perlu melakukan penyajian laporan keuangan yang dapat menghasilkan informasi akuntansi yang memenuhi beberapa karakteristik sesuai yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah yang dimana sistem akuntansi pemerintah adalah serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi pemerintah.

Pengelolaan keuangan daerah memiliki keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Laporan keuangan dalam hal ini berbentuk dari keadaan operasional suatu organisasi perlu diberikan pandangan yang serius, karena tidak sedikit pihak yang sangat membutuhkan informasi mengenai Laporan keuangan, oleh sebab itu sebagai penyusun laporan keuangan memiliki tanggungjawab yang besar dalam melakukan penyusunannya. Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan laporan yang terstruktur

mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelapor yang mana terdapat banyak pihak yang akan mengandalkan laporan keuangan yang disusun sebagai sumber informasi bagi pengguna laporan keuangan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

Oleh karena itu informasi dalam laporan keuangan harus berkualitas, informasi dalam laporan keuangan yang akan di publikasikan harus disajikan secara wajar bebas dari salah saji material sehingga tidak menyesatkan para pengguna, laporan keuangan hanya akan bermanfaat jika informasi yang disajikan valid dan dapat diandalkan bagi pihak yang membutuhkannya. Apabila laporan keuangan yang dipublikasikan buruk maka laporan keuangan tersebut dihasilkan dari sistem akuntansi yang buruk sehingga mengandung kesalahan yang material dalam penyajian, tidak disusun sesuai dengan standar pelaporan, dan tidak tepat waktu dalam penyampainnya maka hal itu akan berdampak buruk bagi para pengguna laporan dan pihak penyaji laporan itu sendiri, Akibat dari laporan keuangan yang salah dan menyesatkan tersebut para pengguna laporan yang kritis dan rasional akan bereaksi dengan memberikan kritikan atau menuntut pemerintah selaku penyaji laporan keuangan karena telah memberikan informasi yang salah dan menyesatkan sehingga pengguna laporan tersebut merasa dirugikan secara material akibat terlalu percaya dengan laporan tersebut. Jika pemerintah mengabaikan reaksi dari pengguna laporan tersebut atau cenderung membela diri, maka pemerintah akan membuat laporan keuangan yang berkualitas buruk. Untuk menghindari hal tersebut salah satu cara adalah pemerintah harus terbuka untuk menerima kritik dan masukan serta berusaha terus untuk memperbaiki kualitas laporan keuangan yang dipublikasikan.

Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi standar akuntansi pemerintah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2005 yang direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Berbasis Akrua, yang kemudian keluarnya Permendagri No 64 Tahun 2013 yang mengharuskan pemerintah daerah untuk menyajikan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Berbasis Akrua. Pengguna laporan keuangan pemerintah daerah (PP 71 tahun 2010) antara lain masyarakat, wakil rakyat,

lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, pinjaman dan pemerintah. Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik: Relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010).

Laporan Keuangan daerah berdasarkan pada SAKD dan penilaian berupa opini dari Badan Pemeriksa Keuangan yang bertujuan untuk peningkatan kualitas laporan keuangan BPK dapat memberikan empat opini berupa: wajar tanpa pengecualian (WTP), opini wajar dengan pengecualian (WDP), opini tidak wajar (TW) dan pernyataan menolak memberikan opini atau tidak memberi pendapat (TMP). Hasil pemeriksaan BPK pada pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah yang terjadi di Kota Dumai pada tahun 2020 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian tetapi BPK masih menemukan kelemahan pengendalian intern dan permasalahan kualitas laporan keuangan yang kurang relevan dan juga terkait kekurangan volume pekerjaan, belanja modal gedung dan bangunan.

Berbeda dengan Rokan Hulu pada tahun 2020 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dengan penjelasan suatu hal (WTP-PSH). Opini BPK yang diberikan atas dasar kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta pengungkapan yang memadai dalam laporan keuangan. Disamping beberapa laporan keuangan instansi pemerintahan yang belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah no 71 tahun 2010 revisi dari Peraturan Pemerintah no 24 tahun 2005, masih terdapat beberapa laporan keuangan instansi yang komponen laporannya belum sesuai dengan PP no 71 tahun 2010 yaitu, laporan realisasi anggaran (LRA), laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, arus kas, laporan operasional (LO), laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan (CALK).

Tuntutan dari implementasi dari peraturan yang ada kompetensi staf akuntansi yang memadai guna meningkatkan kualitas pelayanan untuk masyarakat merupakan salah satu faktor terpenting dalam penyusunan laporan keuangan agar terciptanya laporan keuangan yang memiliki kualitas informasi yang baik sehingga

dapat digunakan oleh pengguna informasi laporan keuangan. Aparat pemerintah daerah berkewajiban memiliki kemampuan atau kompetensi Seperti yang diketahui, proses penyusunan laporan keuangan merupakan proses terpenting dari suatu organisasi untuk mengetahui bagaimana kinerja atau eksistensi suatu organisasi dalam satu periode.

Maka dari itu jika tidak didukung dengan kompetensi staf yang dimiliki akuntansi sendiri maka penyusunan laporan keuangan tidak dapat dilakukan dengan efektif dan tidak bisa menghasilkan laporan keuangan yang dapat dipakai oleh pengguna informasi. Salah satu ukuran keberhasilan kinerja pemerintah Daerah di Kota Dumai dapat diwujudkan pertanggung jawabannya atas akuntabilitas publik dengan laporan keuangan yang berkualitas Dengan kata lain kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sangat dipengaruhi oleh kompetensi staf akuntansi, penerapan sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah yang dimana dapat kita ketahui apakah pemerintah telah melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional, efektif dan efisien. Berbicara tentang kualitas laporan keuangan, kompetensi staf akuntansi, penerapan sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan daerah merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi dalam penyusunan laporan keuangan agar penyajian laporan keuangan memiliki kualitas informasi yang baik sehingga dapat berguna bagi pengguna laporan keuangan baik pemerintahan maupun publik. Kompetensi, penerapan sistem akuntansi dan pengelolaan keuangan daerah yang dimiliki staf Akuntansi sangat bermanfaat dalam penyajian laporan keuangan, karena sebuah sistem bagaimanapun bagusnya, tidak akan berarti apa-apa jika tidak dijalankan oleh pelakunya. Dengan demikian masyarakat ataupun para investor dapat melihat dan memahami laporan keuangan yang dihasilkan sehingga bermanfaat bagi penggunanya.

Hasil penelitan yang mendukung mengenai Pengaruh Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan keuangan Desa di Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan dilakukan oleh Sulfiyah (2018) Dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi staf akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan desa di kecamatan Arosbaya kabupaten Bangkalan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ulhaq, dkk (2020)

tentang Pengaruh Kompetensi Staf terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mendapatkan hasil bahwa Kompetensi staf tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Itu berarti kompetensi aparatur daerah tidak menjadi jaminan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan selalu baik.

Dalam menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah digunakan kebijakan akuntansi agar dapat mengatur perlakuan akuntansi. Dengan adanya perlakuan akuntansi tersebut maka akan dapat menjamin konsistensi penyajian keuangan daerah yang dihasilkan. Kebijakan akuntansi yang dilakukan tersebut harus mengikuti standar akuntansi keuangan pemerintah daerah yang berlaku (Permendagri No. 64 Tahun 2013). Pemahaman terhadap sistem akuntansi keuangan daerah sangat diperlukan dalam menyusun laporan keuangan agar laporan keuangan yang dihasilkan sesuai dengan karakteristik kualitatif laporan keuangan dan tidak mengandung salah saji material.

Dalam Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang keseluruhan kegiatan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Indonesia yakni, relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami yang berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Jadi dengan adanya pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien yang dilakukan oleh pemerintah akan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulfiyah (2018) adalah perbedaan variabel penelitiannya, Sulfiyah (2018) meneliti Pengaruh Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa Di Kecamatan Arosbaya Kabupaten Bangkalan. Ulhaq, dkk (2020) meneliti Pengaruh Kompetensi Staf, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan

Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan peneliti akan meneliti Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Dumai: Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi yang dimana penelitian ini berbeda dari penelitian yang terdahulu.

Berdasarkan fenomena tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Publik Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Dumai dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan latar belakang diatas maka yang menjadi permasalahannya adalah:

1. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Daerah Kota Dumai?
2. Apakah Komitmen Organisasi dapat memoderasi hubungan Penerapan Standar Akuntansi pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Dumai?

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini dilakukan oleh penulis dengan dibatasi oleh beberapa hal, yaitu penelitian yang berfokus pada Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Dumai: Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Dumai

2. Mengetahui pengaruh Komitmen Organisasi dapat memoderasi hubungan antara Penerapan Standar Akuntansi pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Dumai ?

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Aspek Teoritis
Memberikan pemahaman dan penjelasan mengenai pengaruh kompetensi staf akuntansi, penerapan sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
2. Aspek Praktis
Penelitian ini untuk menambah wawasan bagi peneliti dalam hal-hal yang dapat mempengaruhi suatu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Memberikan manfaat bagi pemerintah, yang diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang memadai dan sesuai dengan PSAP

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami skripsi, maka penulis memaparkan sistematika penulisan skripsi, adapun sistematika penulisan dibagi menjadi 5 (Lima) bab, antara lain:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai penelitian terdahulu, dan landasan teori.

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik

pengumpulan data, teknik pengolahan data, metode analisis data, jenis penelitian, dan definisi konsep dan definisi operasional.

BAB 4 : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Pada bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB 5 : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang telah dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian serta saran dari peneliti.

